

PELATIHAN ADMINISTRASI PEMERITAHAN KELURAHAN BERBASIS ONLINE DI KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI TAHUN 2022

¹ Sartono, ² La Ode Muhammad Elwan, ³ Muh. Yusuf, ⁴ Taufik, ⁵ La Ode Aslim
^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Administrasi akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
Correspondence author: sartonos1969@gmail.com
Kota Kendari, 93232, Indonesia

Info Artikel

History Article:

Accepted (06-10-2022)

Approved (08-10-2022)

Published (11-10-2022)

Keywords:

Online administration;
Training; Village
Government
Administration

Abstract

Community service activities integrated with thematic Real Work Lectures (KKN) of Halu Oleo University aim to contribute to the government and citizens, especially in public services in the midst of the New Normal period in Southeast Sulawesi. This activity is an online-based Urban Village Administration Training in Nambo District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The method used in the Thematic KKN is carried out directly at the activity location. Students are active from the beginning to the end of KKN activities carried out in the domicile area. The results of community service activities through Thematic KKN for students provide information that the average village government apparatus does not yet know and understand how to use internet technology facilities in public services, especially in managing village administration online based. There is only 1 website in the sub-district and all kelurahan do not yet have a website. There has never been any technical training on website management for village officials. Local government support is very limited in providing resources in realizing online-based urban administration.

Kata Kunci:

Administrasi pemerintah
Kelurahan; Administrasi
Berbasis online; Pelatihan

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingkup Universitas Halu Oleo bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dan warga khususnya dalam pelayanan publik di tengah masa New Normal di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini adalah Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam KKN Tematik ini dilakukan secara langsung dilokasi kegiatan. Mahasiswa beraktivitas mulai dari awal sampai akhir kegiatan KKN dilakukan di wilayah domisili Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik bagi mahasiswa memberikan informasi bahwa rata-rata aparat pemerintah kelurahan belum mengetahui dan memahami bagaimana cara menggunakan fasilitas teknologi internet dalam pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan administrasi kelurahan berbasis online. Hanya terdapat 1 website di kecamatan dan semua kelurahan belum memiliki website. Belum pernah ada pelatihan teknis tatakelola website kepada aparat kelurahan. Dukungan pemerintah daerah sangat terbatas dalam menyediakan sumberdaya dalam mewujudkan administrasi kelurahan berbasis online.

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jpnus/index>

Jurnal Pengabdian NUSANTARA is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

New Normal, dengan posisi pandemi yang tidak pasti, desakan untuk menormalkan berbagai bidang kehidupan terutama tatakelola pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial sebagai upaya berkelanjutan untuk memahami sifat virus dan menjinakkannya. WHO dan pemerintah di berbagai negara sudah mulai mencanangkan pola kerja baru untuk hidup berdampingan dengan COVID 19 dalam gagasan "new normal". Kebutuhan

untuk kembali normal ditandai dengan dimulainya kembali aktivitas sosial dan ekonomi sebagai akibat dari ketakutan akan resesi, mengingat pandemi hampir sepenuhnya menghentikan pergerakan pemerintahan, pihak swasta, politik, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam posisi ini, layanan terbaik untuk menggerakkan roda pemerintahan, pelayanan publik dan perputaran uang di masyarakat banyak dilakukan melalui penggunaan fasilitas internet dengan berbagai tools atau instrument berupa program dan aplikasi sebagai media yang paling efektif mematahkan pemikiran banyak orang bahwa virus corona dapat mematikan sekaligus melumpuhkan aktivitas manusia diberbagai aspek kehidupan. Terbukti dengan kondisi pandemi covid-19 justru memberikan peluang hidup baru, peluang usaha baru dan aktivitas baru bagi pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digital melalui fasilitas internet dalam pelayanan kebutuhan negara, lembaga/badan dan masyarakat.

Untuk diketahui bahwa pengguna internet di dunia secara alamiah tumbuh dengan pesat. Berdasarkan data statistik pertanggal 30 Juni 2021 terdapat 5,251,737,363 orang telah menggunakan internet dan untuk pengguna internet di Indonesia pada tahun 2000 hanya 2 jt orang dan pertanggal 30 Juni 2021 telah mencapai 212,354,070 orang. Posisi orang Indonesia dalam penggunaan internet adalah urutan kedua di Asia setelah India atau 755,820,000 (76,8%) orang (www.internetworldstats.com) dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun jumlah tersebut lebih banyak digunakan oleh pengguna facebook 176,500,000 orang. Diperkirakan penggunaan internet akan semakin meluas dengan cepat seiring dengan perkembangan infrastruktur dan ketersediaan teknologi informasi yang makin terjangkau. Internet merupakan salah satu media informasi yang paling efektif untuk penyebaran informasi. Inpres tahun 2003 menginstruksikan kepada instansi-instansi pemerintah untuk mengimplementasikan system egovernment bagi pelayanan masyarakat.

Hadirnya internet memudahkan ruang dan jarak dalam berkomunikasi. Seperti yang digambarkan oleh McLuhan dalam *Understanding Media* (2001) sebagai kampung global (global village), dimana masyarakat berinteraksi dan dibentuk oleh teknologi elektronik di dunia semakin mengerut. Internet dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang melibatkan komunitas atau masyarakat.

Menghadapi Covid-19, pemerintah mulai menjajaki menuju "New Normal" (Kenormalan Baru). Gaya baru hidup bermasyarakat baru ini mempengaruhi segala aktivitas termasuk bidang ekonomi yang berwujud virtual.

Di Indonesia, sebagaimana dirilis *Managing Director Analytic Data Advertising (ADA)*, negara ini akan terjadi kenaikan digital bisnis secara signifikan selama masa pandemi. Berbagai aplikasi pertemuan online diandalkan oleh pelaku bisnis guna mengurangi intensitas pertemuan. Hal ini berimbas pada meningkatnya industri logistik, jasa kesehatan, jasa pengiriman, jasa kuliner dan makanan, maupun jasa komunikasi berbasis digital.

Kondisi "New normal" pasca pandemi akan mengubah trend sosial, lingkungan hingga bisnis di kalangan masyarakat. Transaksi bisnis menjadi berbeda. Konsumen yang berbelanja secara fisik berkurang, berubah menjadi porsi digital yang lebih besar. Ruang ini menjadi peluang muncul usaha baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan dukungan internet. Tidak mustahil juga bisa dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Tentunya pemerintah kelurahan dapat menjadi *leading sector* atau fasilitator sekaligus mediator antar warga dan pelaku bisnis di wilayah kerjanya. Hal yang bisa dilakukan pemerintah kelurahan antara lain dengan menyediakan data dan informasi potensi usaha yang dapat dikembangkan bagi warganya.

Penurunan kasus yang diikuti dengan pengurangan PSBB, bukan berarti virus sudah hilang, tetapi penyebaran virus sudah dapat dikendalikan. Oleh karena itu, masyarakat akan menuju kehidupan normal baru beberapa bulan ke depan. Tetap waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan menjadi penting dilakukan.

Sementara disisi lain pelayanan publik harus tetap dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintah, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Harapannya adalah di masa new normal ini, pemerintah termasuk kelurahan dapat melakukan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat dan terukur sesuai standar pelayanan yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi misalnya bentuk layanan yang diterapkan pemerintah kelurahan masih dilakukan secara konvensional. Potensi penularan penyakit atau covid-19 masih terbuka. Maka jawaban paling efektif bentuk pelayanan pemerintah kepada warga adalah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai upaya untuk tetap waspada terhadap penularan virus tersebut. Dengan demikian solusi pelayanan publik pada tingkat pemerintah kelurahan adalah penerapan sistem layanan berbasis digital. Meskipun sistem layanan berbasis digital bukanlah hal yang baru, akan tetapi untuk pemerintah kelurahan belum banyak digunakan, sehingga sudah tepat dan saatnya pemerintah kelurahan beralih model pelayanan dari yang manual ke sistem digital.

Tujuan dasarnya adalah pembaharuan, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, tanggung jawab dan ekonomi dalam pekerjaan pemerintah dan para pegawai pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi dan layanan yang diberikan kepada pengguna pegawai pemerintah dan memastikan partisipasi yang lebih aktif warga dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat.

Atas dasar tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menerapkan layanan berbasis website (teknologi informasi) sebagai salah satu model sistem pemerintahan yang berorientasi pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, [pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik](#)

lembaga yang bersangkutan dikendalikan dalam satu sistem dan juga merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal ini terjawab dengan di keluarkannya Pepres nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menyatakan:

- a. Bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan ini sesungguhnya untuk mewujudkan *e-Government* sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan menggunakan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Dalam kondisi ini, pemerintah tidak terkecuali pemerintah kelurahan sudah seharusnya menganut paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (*customer driven*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematis, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban, semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah desa dan semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah di desa.

Dalam kondisi masyarakat yang digambarkan diatas, pemerintah harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Namun, peralihan pelayanan dari manual ke sistem digital tidaklah sederhana, tetapi harus dimulai dari sekarang, sebab sistem digital saat ini sudah menjadi tuntutan zaman

teknologi dan informatika atau pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat (komunitas). Hal lain yang penting dari sistem digital ini antara lain: (1) Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer; (2) Adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan tepat; (3) Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (*open source*) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa; (4) Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke kelurahan. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu. Dengan sistem digital ini maka akan sangat membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data milik kelurahan guna memudahkan proses pencariannya dimaksudkan sebagai suatu rangkaian/ sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di kelurahan. Dalam sistem informasi digital pemerintah kelurahan paling tidak akan tersedia informasi yakni: (1) Basis data kependudukan kelurahan, meliputi data dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll); (2) Informasi dokumen-dokumen kelurahan seperti data kependudukan, program kerja Peraturan pemerintah, Keputusan lurah dan lain sebagainya; (3) Basis data sumber daya kelurahan, memuat data tentang potensi kelurahan; (4) Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat kelurahan; (5) Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa. Di mana informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah kelurahan dan masyarakatnya.

Untuk itu pelayanan publik berbasis website di kelurahan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kebutuhan kegiatan pemerintah kelurahan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Selain itu sistem informasi digital juga bertujuan antara lain: (1) Menyimpan dan memperbaharui database warga yang aman serta akurat; (2) Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan lokal; (3) Membantu proses penyusunan perencanaan kelurahan; (4) Menjadi alat partisipasi warga agar dapat terlibat dalam pembangunan kelurahan; (5) Perencanaan Pembangunan kelurahan Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan; (6) Keterbukaan Informasi Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya; (7) Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif dengan indikator lokal. Data ini

yang kemudian menjadi dokumen kelurahan yang dapat digunakan untuk verifikasi data yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak non-pemerintah; (8) Peningkatan Pelayanan Dasar Tidak tersedianya data yang akurat serta penggunaan sistem manual dalam membangun data di kelurahan biasanya pelayanannya lamban.

Hal ini tentu dilakukan untuk menjawab pengembangan infrastruktur TIK di kelurahan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa sistem informasi pembangunan diberbagai tingkatan pemerintahan dan pembangunan kawasan akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

Tantangan sekarang adalah sudah siapkah sumberdaya yang dimiliki kelurahan? Tentunya keadaan ini dapat terpenuhi jika sumberdaya utamanya sumberdaya manusia aparat pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kerja-kerja menggunakan teknologi informasi seperti penerapan Sistem Informasi Desa/kelurahan (SID) berbasis website dan menjadi kebutuhan bagi pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Website kelurahan berkembang dengan adanya media digital. Kini informasi dan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat dapat diakses kapanpun dan dimanapun karena program ini tidak terbatas waktu seperti halnya pelayanan di Kantor Lurah yang masih konvensional. Bagaimana dengan tatakelola administrasi pemerintahan kelurahan di kelurahan yang ada di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara? Apakah sudah murni online, semi online atau masih offline (manual/konvensional) ?

Data tentang Website Kelurahan yang ada di Kota Kendari sangat sedikit, bahkan dapat dipastikan tidak memenuhi standar informatif. Jika pun itu ada website kelurahan belum memberikan manfaat banyak bagi pengguna layanan atau warganya. Tentunya hal ini sebagai akibat dari lemahnya inisiasi dan sumberdaya pemerintah kelurahan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital atau internet.

Kondisi eksisting pelayanan publik di beberapa kelurahan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara masih menggunakan sistem manual. Sistem manual tersebut di khawatirkan membuat data yang tersimpan pada perangkat komputer menjadi lebih mudah riskan atau hilang dan juga sistem manual membuat masyarakat mendapatkan pelayanan publik seperti urusan administrasi di kelurahan (pembuatan Kartu Keluarga), KTP, program layanan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat, masih memakan waktu cukup lama. Untuk diperlukan layanan berbasis website kelurahan melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online.

Berdasarkan uraian diatas dapat didefinisikan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparat kelurahan dalam tatakelola administrasi pemerintahan berbasis online.
2. Minimnya keterampilan aparat kelurahan dalam mengelola data dan informasi secara online berupa ketersediaan dokumen-dokumen kelurahan seperti desain program kerja

berbasis kebutuhan warga, Peraturan yang berlaku, metode pengambilan keputusan pimpinan, serta sistem arsip dalam bentuk dokumen digital.

3. Kurangnya informasi pemerintah kelurahan, yang memuat data tentang topografi kelurahan dan potensi sumberdaya termasuk sumberdaya ekonomi sebagai upaya pemulihan ekonomi di era new normal.
4. Minimnya informasi tentang titik rawan bencana dan upaya mitigasinya dari pemerintah kelurahan baik secara offline maupun online.
5. Belum terwujudnya komitmen dan kepedulian terhadap Tatakelola Pemerintah Kelurahan Berbasis online.

METODOLOGI

Persiapan dan Rekrutmen Peserta

Pada tahap persiapan, pembimbing membuat media komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan membuat WAG (whatsapp group) untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta KKN tentang kebutuhan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program kerja utama (Universitas berdasarkan tema/judul) dan program kerja peserta yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing yang disepakati bersama pemerintah desa/kelurahan. Pada tahapan ini, pembimbing KKN tematik melalui Ketua Pembimbing mengundang dan melakukan rapat pembimbing untuk mempersiapkan kebutuhan program utama pelatihan secara virtual serta menetapkan narasumber dan materi yang akan disampaikan pada acara tersebut. Pada tahapan ini, juga mempersiapkan metode aplikasi zoom dalam pembekalan KKN tematik bagi peserta KKN yang tersebar di beberapa desa/kelurahan di Sulawesi Tenggara.

Pembekalan Mahasiswa

Pembekalan mahasiswa akan dilakukan selama kurang lebih minimal 3 kali yang bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO dengan materi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan pengabdian pada masyarakat terintegrasi KKN Tematik
2. Maksud dan tujuan serta nilai-nilai yang dikandung oleh semangat KKN
3. Posisi dan peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara dalam proses pembangunan
4. Pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Pengetahuan tentang tindakan pencegahan melawan virus Covid-19
6. Informasi awal tentang Pelatihan online (VIRTUAL TRAINING) mengenai Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Web Desa) Dalam Pelayanan Publik Untuk Mendukung *Physical Distancing* Menangkal Penyebaran Covid 19 Di Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Materi Virtual Training dan pengelolaan kelompok

Pelaksanaan KKN Tematik

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat terintegrasi KKN-Tematik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penegelolaan administrasi pemerintah kelurahan berbasis online kepada aparat/operator website. Secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Registrasi Ulang peserta melalui google form: data base peserta sesuai lokasi kegiatan KKN.
2. Distribusi Kebutuhan KKN: ID Card, baju peserta, dana kebutuhan selama di lokasi
3. Kepastian Peserta Pelatihan Administrasi Pemerintah Kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari: target peserta adalah operator/aparat kelurahan. Dilakukan melalui membuat surat kesedian pemerintah setempat untuk memngirimkan utusan kelurahan dan komunikasi melalui WhatSapp.
4. Pelaksanaan Pelatihan Administrasi Pemerintah Kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Laporan Kegiatan KKN Tematik

Laporan kegiatan dibuat oleh mahasiswa KKN tematik Universitas Halu Oleo dan Laporan Dosen Pembimbing. Metode digunakan adalah mahasiswa melakukan pengiputan data berupa catatan kegiatan dan foto dokumentasi pada laman secara online melalui aplikasi (software) dan melalui WhatSapp. Sedangkan dosen membuat Laporan tertulis dan selanjutnya output kegiatan dari laporan kegiatan dosen wajib dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Kegiatan KKN TEMATIK Universitas Halu Oleo tahun 2022 dengan Judul Pelatihan Adminsitrasi Pemerintah Kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Kecamatan Nambo sudah dimekarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari pada tahun 2017. Pemekaran atas persetujuan DPRD Kendari dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari. Namun, kecamatan baru hasil pemekaran tersebut belum terdaftar dan memiliki registrasi kode wilayah di Kemendagri pada tahun 2021. Batas Wilayah Kecamatan Nambo mempunyai batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kendari. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan atau Konsel. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konsel. Wilayah Kecamatan Nambo terdiri dari enam kelurahan yakni Kelurahan Tobimeita, Kelurahan Petoaha, dan Kelurahan Nambo. Selain itu, Kelurahan Bungkutoko, Kelurahan Sambuli, dan Kelurahan Tondonggeu dengan luas wilayah:

Program Kerja Utama KKN Tematik

Waktu pelaksanaan KKN selama 1 (satu) Bulan.

Pelaksanaan Prorgam Kerja KKN Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2022 adalah "**Pelatihan Administrasi Pemerintah Kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari**".

Pelatihan ini dilaksanakan secara offline (tatapmuka) secara langsung antara narasumber dan peserta sebagai metode pelaksanaan yang efektif.

Pelatihan Adminsitrasi Pemerintah Kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari sebagai pertimbangan mendasar untuk dilaksanakan adalah tuntutan regulasi/perUndang-Undang dalam menerapkan *e-Government* terhadap pelayanan publik dan masih banyaknya pelayanan publik yang dilakukan secara konvensional sehingga memperlambat dan menyulitkan sistem administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah belum adanya wesite desa dan kelurahan dalam menjawab kebutuhan layanan informasi dan data secara online.

Amanah Regulasi dan khusus pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka menjadi urgen untuk diwujudkan sistem informasi pemerintahan desa/kelurahan berbasis digita (webdesa/kelurahan) dalam pelayanan publik.

Manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi pemerintahan desa/kelurahan berbasis digital (website) adalah

- 1) Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi secara lengkap dan tertata serta mudah menemukannya.
- 2) Tersedianya Data Penduduk yang valid dan ter update (*real time*)
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan.
- 4) Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan
- 5) Apabila Sistem Informasi Administrasi Kelurahan bersifat online maka akan membantu dalam mempromosikan daerah;
- 6) Sarana promosi potensi sumber daya alam, SDM, sosial budaya, dan ekonomi di kelurahan;
- 7) Program dan potensi unggulan kelurahan dapat dibagikan ke masyarakat luas dalam bentuk tulisan, foto maupun video (akses jaringan kerja);
- 8) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- 9) Membantu mempercepat pihak-pihak terkait yang membutuhkan data dan informasi tentang kelurahan;
- 10) Informasi dan pengumuman penting yang berhubungan dengan pemerintah kelurahan, dapat ditampilkan di website ini, sehingga seluruh warga selalu mengetahui perkembangan terkini di wilayahnya;
- 11) Warga dapat memantau program pembangunan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai aturan atau terindikasi adanya kecurangan;

12) Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan peningkatan literasi TIK serta terbukanya peluang demokratisasi;

13) Mendorong tumbuhnya serta terbukanya peluang transaksi ekonomi (Membuka peluang tumbuhnya kegiatan e-commers dll).

Berdasarkan manfaat tersebut, harapannya adalah di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Nambo mampu mewujudkan sistem pemerintahan kelurahan berbasis online (membuat website kelurahan) sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Hal ini sesuai dengan konsep Aparatur Pemerintah Kelurahan yang merupakan alat penyelenggara pemerintahan di wilayahnya. Oleh karena itu aparatur pemerintah kelurahan mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat mencakup 5 indikator pelayanan yaitu sesuai KEPMENPAN No.63 Tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik) secara detil diuraikan sebagai berikut :

1) Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam arti bahwa Prosedur/tatacara pelayanan maksudnya aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan

Kejelasan dalam arti adanya kejelasan yang dipublikasikan/diumumkan dalam memberikan pelayanan aparatur pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa persyaratan teknik atau persyaratan administratif.

3) Kelengkapan sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam arti tersedia sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

4) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dalam arti pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

5) Kenyamanan; Kenyamanan dalam arti lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2022.

A. Kondisi Faktual Adminsitration Kelurahan Berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi KKN Tematik Universitas Halu Oleo yang tersebar di beberapa kelurahan Kecamatan Nambo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa semua kelurahan di lokasi KKN belum memiliki website kelurahan. Yang

ada cuman website Kecamatan Nambo, itupun belum difungsikan secara maksimal akibat kekurangan sumberdaya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, belum tersedianya dukungan sumberdaya dari pemerintah setempat dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan kelurahan berbasis online (website kelurahan). Hal ini sesuai hasil pernyataan peserta pelatihan di Aula Kecamatan Nambo bahwa:

"kami memang memiliki niat untuk mengembangkan sistem pemerintahan kelurahan melalui pembuatan website, namun kami kesulitan sumberdaya manusia (admin/operator), belum adanya dukungan pendanaan yang mesti diprogramkan lebih dahulu serta kurangnya pemahaman terkait tatakelola sistem informasi kelurahan apalagi tentang website. (pernyataan Imam Alkadri.S, 23 Agustus 2022)

Pernyataan peserta pelatihan tersebut juga dialami oleh kelurahan lain yang menjadi tempat domisili peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo. Artinya semua kelurahan di lokasi tersebut belum memiliki website kelurahan. (jawaban seluruh peserta pelatihan, 23 Agustus 2022).

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Sumber pendanaan pengadaan fasilitas website yang terbatas
2. Belum tersedianya sumber daya manusia (operator)
3. Masih lemahnya respon pimpinan satuan kerja akan pentingnya sistem informasi dan data kelurahan secara online sebagai suatu kebutuhan para pihak.

B. Pelaksanaan Pelatihan Adminstrasi Kelurahan Berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

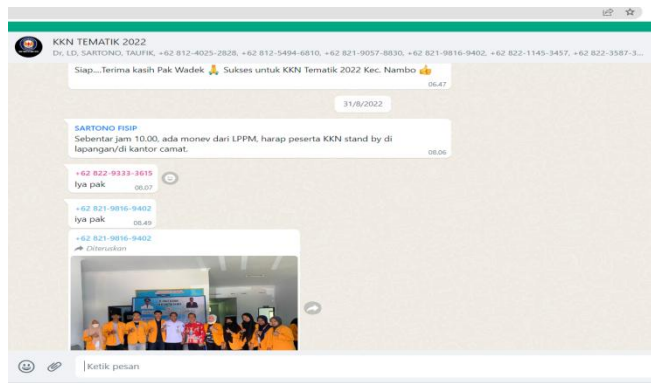
1. Tahap Persiapan KKN Tematik Universitas Halu Oleo

Pada tahap persiapan, pembimbing membuat media komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan membuat WAG (whatsapp group) untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta KKN tentang kebutuhan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program kerja utama (Universitas berdasarkan tema/judul) dan program kerja peserta yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yang disepakati bersama pemerintah kelurahan Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Pada tahapan ini, pembimbing KKN tematik melalui Ketua Pembimbing mengundang dan melakukan rapat pembimbing untuk mempersiapkan kebutuhan program utama pelatihan serta menetapkan narasumber dan materi yang akan disampaikan pada acara tersebut. Pada tahapan ini, juga mempersiapkan kebutuhan dalam pembekalan KKN tematik bagi peserta KKN.

Persiapan lain yang dilakukan adalah mendistribusikan surat pengantaran mahasiswa KKN Tematik di lokasi dengan cara membagikan surat tersebut kepada peserta KKN tematik kemudian peserta melaporkan diri kepada pemerintah setempat. Selanjutnya, pada tahap persiapan ini pembimbing mendistribusikan kebutuhan peserta KKN tematik berupa uang

makan (kebutuhan hidup), ID Card, Baju KKN, Kartu Asuransi dan ATK guna kelancaran pelaksanaan KKN Tematik di kelompok ini.



Gambar 2. WAG KKN Tematik Universitas Halu Oleo tahun 2022.

2. Tahap Pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo

Berikut Tahapan Pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2020:

a) Pelepasan Peserta KKN Tematik oleh Rektor Universitas Halu Oleo

Peserta diwajibkan untuk mengikuti Pelepasan KKN Tematik oleh Rektor Universitas Halu Oleo secara offline dan melalui aplikasi Zoom dan masing kelompok mempersiapkan wakilnya sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.

Waktu pelaksanaan Pelepasan Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo pada Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus Tahun 2022 di ruang Rapat Senat Lt.4 Rektora Universitas Halu Oleo.



Gambar 3. Pelepasan Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo oleh Rektor

b) Pembekalan Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo

Pada tahapan ini, pembimbing KKN berkoordinasi dengan peserta KKN untuk mengikuti Pembekalan KKN Tematik di AULA FISIP Universitas Halu Oleo pada Tanggal 2 Agustus 2022. Peserta KKN wajib hadir dan dalam pembekalan banyak hal yang disampaikan termasuk membuat ketentuan (tata tertib) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KKN.



Gambar 4. Pembekalan Peserta KKN Tematik, 2 Agustus 2022

Pada saat pembekalan, Pembimbing memberikan informasi umum dan khusus terkait program kerja, tujuannya agar output Kegiatan KKN Tematik Universitas Halu Oleo dapat tercapai.

c) Peserta Melapor Kepada Pemerintah Setempat

Pada kegiatan ini, peserta diwajibkan untuk melaporkan diri kepada pemerintah setempat (kelurahan Nambo) Kota Kendari. Peserta diterima oleh Camat Nambo pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 di Kantor Camat Nambo Kota Kendari dan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan.



Gambar 5. Peserta KKN Tematik Melapor kepada Pemerintah setempat.

Pada tahapan ini, setelah peserta KKN Tematik melaporkan diri pada pemerintah setempat selanjutnya berkoordinasi untuk merencanakan program kerja sesuai tema/judul: Pelatihan Administrasi pemerintahan kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Dalam pelaksanaan program kerja, peserta KKN Tematik diharapkan dapat melakukan program kerja utama dan program lainnya yang dibahas bersama dengan pemerintah setempat dan warga dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dan sumberdaya yang ada. Rapat pembahasan program kerja dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kantor Camat. pembahasan program kerja, dihadiri langsung oleh Camat Nambo dan beberapa Lurah bersama Pembimbing KKN dan Peserta KKN Tematik UHO tahun 2022.

d) Pelaksanaan Program Utama Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online di Kecamatan Nambo Kota Kendari Tahun 2022.

Kegiatan Pelatihan Administrasi pemerintahan kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari dilaksanakan pada Hari Sabtu, 11 Juli Tahun 2020.

Pada tahapan ini, pembimbing KKN Tematik UHO berkoordinasi kepada peserta KKN untuk melaporkan peserta Pelatihan Administrasi pemerintahan kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Metode komunikasi yang digunakan adalah melalui WhatSapp Group dengan mengirim nama peserta yang berasal dari kelurahan se kecamatan Nambo sesuai usulan pemerintah setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online di Kecamatan Nambo Kota Kendari diikuti oleh utusan kelurahan dan Operator website kecamatan.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah dari Dosen Pembimbing KKN Tematik Universitas Halu Oleo tahun 2022.

Metode kegiatan dilakukan melalui tatap muka langsung dan membuka ruang interaksi antar narasumber dan peserta sehingga terjadi komunikasi dua arah dalam memberikan materi dan umpan balik (diskusi) sesuai permasalahan yang berkembang dalam forum Pelatihan Administrasi pemerintahan kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.

Acara Pelatihan Administrasi pemerintahan kelurahan berbasis online di Kecamatan Nambo Kota Kendari dilaksanakan pada Tanggal 23 Agustus Tahun 2022 di Aula pertemuan Kantor Kecamatan Nambo.

Dalam pelatihan ini, acara dibuka langsung oleh Bapak Camat Nambo sekaligus memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan yang berasal dari utusan masing-masing kelurahan se Kecamatan Nambo Kota Kendari. Daftar peserta pelatihan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Peserta Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online di Kecamatan Nambo

No	Nama	Utusan
1	Dasri	Kec. Nambo
2	Yulianti	Operator web camat nambo
3.	Anto Ahudi, SP	Kelurahan Tobimeita
4.	Lili Andi	Kelurahan Tobimeita
5.	Skari Kadir, SE	Kelurahan Petoaha
6.	Rajuati, SE	Kelurahan Petoaha
7.	Hasran, B	Kelurahan Nambo
8.	Hasan	Kelurahan Nambo
9.	Yoni	Kelurahan Bungkutoko
10.	Siloman Yansari, S.STP	Kelurahan Bungkutoko
11.	Asni	Kelurahan Sambuli
12.	Hamsidar, S.IP	Kelurahan Sambuli
13.	ASriady Asdar, ST	Kelurahan Tondonggeu
14.	Samsudin	Kelurahan Tondonggeu
15.	Caca Friska	Kelurahan Nambo
16	Abet Sofian Syamsir	Kelurahan Nambo
17	Ewiana	Kelurahan Petoaha
18	Andri Irdas	Kelurahan Petoaha
19	Reza Adityaaryan	Kelurahan Sambuli
20	Ihlas	Kelurahan Sambuli
21	LD Ndibala	Kelurahan Tobimeita
22	Amran	Kelurahan Bungkutoko
23	Umayyah	Kelurahan Nambo
24	Imam Alkadri.S	Staf Kecamatan

Tabel 2. Narasumber Pelatihan

No	Nama	Materi
1	Dr. Sartono, S.Sos., M.Si	Manajemen Administrasi Pemerintahan Kelurahan berbasis online dalam pelayanan public
2	La Ode Muhammad Elwan, S.Sos.,MPA	Pengelolaan Website Kelurahan & Sistem Informasi Kelurahan Dalam Pelayanan Publik

Tujuan dari pelatihan ini adalah peserta dapat memahami Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis online Dalam Pelayanan Publik dan memiliki keterampilan dalam Tatakelola Website Kelurahan.

Peserta Pelatihan diharapkan pula dapat mempersiapkan kebutuhan website kelurahan sebagai data base yang standar memberikan informasi antara lain:

- 1) Profil Kelurahan (Sejarah singkat, letak, kondisi geografi, sosial, dsb)
- 2) Potensi Kelurahan (Pertanian, Industri, Pariwisata, dsb)
- 3) Berita-berita seputar kelurahan
- 4) Hasil Bumi dan Produk kelurahan
- 5) Keputusan, peraturan-peraturan dan Kebijakan pemerintah
- 6) Laporan Tahunan
- 7) Perencanaan Pembangunan

- 8) Program/Proyek/Kegiatan kelurahan (rencana kerja tahunan/bulanan, dsb)
- 9) Agenda Kelurahan
- 10) Prosedur Layanan Masyarakat (Pengurusan IMB, KTP, Dsb)
- 11) Memory Kegiatan (Galeri Foto/video)

Untuk memiliki pemahaman yang sama, peserta pelatihan juga dapat memahami tugas dan fungsi operator website (admin) yaitu:

- 1) Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan pengelolaan website
- 2) Mengumpulkan, mencari dan menerima data/informasi/berita untuk isi Website.
- 3) Memverifikasi data/informasi atau berita yang masuk untuk dilihat layak tayang/muat atau tidak. (Hukum, Norma dan Etika)
- 4) Mengolah data/informasi menjadi kemasan yang menarik dan bernilai informasi (Estetika dan manfaat)
- 5) Memasukan/memposting data ke web kelurahan.

Administrator (Admin) adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur aktivitas website dan forum. Misalnya menghapus *thread* (berkas, lembar, halaman dll) yang mengandung unsur SARA dan pornografi, menutup *thread* apabila masalah sudah terpecahkan, atau menginformasikan sesuatu kepada pengguna forum. Kemudian Admin dipilih diantara pengelola website desa, dan bekerja secara bergantian sehingga sistem informasi dapat terupdate setiap saat.



Gambar 6. dokumentasi Pelatihan pada KKN Tematik UHO Tahun 2022.

Dalam pelatihan ini, sala satu peserta dari aparat Kelurahan Kecamatan Nambo Kota Kendari pada sesi diskusi menyatakan bahwa

“pelatihan model ini sebenarnya yang kami butuhkan saat ini, karena sangat membantu kerja-kerja kami di kelurahan. Data yang kami kelola masih manual dan terkadang terjadi tumpang tindih data. Seperti data penduduk miskin, data NIK, yang selalu kami perbaiki setiap dibutuhkan. Harapan saya pihak unhalu dapat membuat pelatihan lanjutan yang lebih teknis sehingga transfer pengetahuan tentang Tatakelola website benar-benar kami peroleh.” (LD Ndibala, 23 Agustus 2022).

Pentingnya pelatihan ini juga disampaikan oleh Caca Friska. Beliau mengatakan bahwa:

“kami belum memiliki website. bagaimana cara memulai dan bagaimana pendanaannya ? termasuk bagaimana mendapatkan modul ? Kemudian, pelatihan ini merupakan hal baru bagi kami. Rencana kami untuk membuat website desa namun terkendala sumberdaya manusia dan pendanaan. Kami juga ragu untuk menyampaikan niatan kami kepada pemerintah desa, kemauan kami untuk belajar mengelola website sangat besar. Kami berharap Univeritas Halu Oleo dapat

membantu untuk memberikan informasi tentang penting website desa kepada pemerintah desa dan kedepan dapat melanjutkan pelatihan ini. (Caca Friska, 23 Agustus 2022).

Hasil diskusi pada pelatihan ini menunjukkan bahwa website desa/kelurahan menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Harapan peserta adalah bentuk pelatihan sistem informasi pemerintahan kelurahan berbasis digital (website) menjadi hal yang urgen untuk dikembangkan dan diwujudkan sebagai jawaban prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada warga. Peserta pelatihan juga berharap, Universitas Halu Oleo dapat membuka jalan dan dapat bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Nambo sehingga pengelolaan website kelurahan dapat terpenuhi. Kesiapan sumberdaya menjadi hal mutlak untuk dipenuhi oleh pemerintah baik itu sumberdaya manusia, pembiayaan dan fasilitas penunjang website (hardware dan software) termasuk jaringan internet yang stabil dan mudah di akses oleh user/pengguna layanan.

Subtansinya adalah kemauan dan komitmen bersama antara pemimpin di daerah/desa/ bersama masyarakat dalam menerapkan layanan publik secara online.

e) Sistem Informasi Website Kelurahan.

Menurut O" Brien (2005), Sebuah sistem informasi adalah suatu kombinasi yang teratur dari orang-orang, perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), jaringan komunikasi dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi.

Dalam arti sempit Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan adalah sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan kelurahan dalam mendokumentasikan data-data milik kelurahan guna memudahkan proses pencariannya.

Dalam arti luas, SIM Pemerintah berbasis digital diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas/kelurahan.

Untuk membangun sebuah website, dibutuhkan tersedianya unsur penunjang selain sumberdaya manusia dan pembiayaan (dana) antara lain:

- 1) Nama domain atau URL (*uniform resource locator*)

Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengenali /menemukan/mengakses sebuah website di internet.

CONTOH:

<https://kendarikota.go.id/>

- 2) *Web Hosting* adalah ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lainnya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website.

Kedua unsur penunjang tersebut menjadi kebutuhan dasar dalam tatakelola sebuah website yang menjadi rumah informasi dan data. Semua informasi dan data secara teknis membutuhkan sumberdaya manusia (admin) atau operator website sebagai pengendali sistem dan dibutuhkan komitmen dari pemimpin daerah untuk menyediakan pembiayaan pembuatan dan operasional pengelolaan website serta menjaga keberlangsungannya.

Kegiatan Penunjang Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo.

Adapun kegiatan penunjang KKN Tematik terintegrasi penelitian dosen adalah sebagai berikut: Adapun kegiatan Penunjang Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2022 secara rinci diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. kegiatan Penunjang Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2022

N o.	Kegiatan	TempatPelaksanaan	Pelaksanaan
1	Penerimaan KKN Tematik Oleh Camat Nambo	Kantor Camat	2 Agustus 2022
2	Rapat Program Kerja Bersama Camat Nambo	Kantor Camat	4 Agustus 2022
3	Pembahasan Teknis Mengenai Lomba 17-an Bersama Kelompok KKN Tematik Se-Kecamatan Nambo	Kantor Camat	8 Agustus 2022
4	Konsultasi Mengenai Program Kerja Pembuatan Visi Misi Kecamatan Nambo	Kantor Camat	11 Agustus 2022
5	Membersihkan Garis Pantai	Pantai Nambo	13 Agustus 2022
6	Mengikuti Jalan Santai Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-77	MTQ (Kantor Walikota)	14 Agustus 2022
7	Kunjungan Di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Nambo	Kantor Kelurahan Tobimeita Kecamatan Nambo	15 Agustus 2022
8	Kunjungan di Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo	Kantor Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo	16 Agustus 2022
9	Pelaksanaan Lomba 17-an Oleh Kelompok KKN Tematik Se-Kecamatan Nambo	Lapangan Kelurahan Nambo	18 Agustus 2022
10	Seminar Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online Di Kecamatan Nambo Kota Kendari	Kantor Camat	23 Agustus 2022
11	Pelaksanaan Lomba kejuaraan Bersama Karang Taruna Kecamatan Nambo	Lapangan Kelurahan Nambo	27-29 Agustus 2022
12	Pembuatan Baliho Visi Misi Kecamatan Nambo	Kantor Camat	30 Agustus 2022
13	Pembuatan Papan Informasi	Kantor Camat	30 Agustus 2022
14	Pemasangan Baliho Visi Misi Kecamatan Nambo	Kantor Camat	1 September 2022
15	Pemasangan Papan Informasi	Kantor Camat	1 September 2022
16	Penarikan KKN Tematik 2021 UHO	Kantor Camat	2 Septemer 2022

Sumber: data diolah 2022

Dokumentasi Kegiatan



Foto: Rapat Pembahasan Program Kerja Bersama Camat Nambo



Foto: kegiatan pembersihan garis pantai Nambo



Foto: Bakti Sosial & Kunjungan ke Kantor Kelurahan Tobimeita



Foto: Pelaksanaan lomba 17-an dalam rangka menyambut HUT RI Ke-77



Foto: Pelaksanaan lomba kejuaraan bersama karang taruna kecamatan Nambo



Foto: Pembuatan Dan Pemasangan Baliho Visi Misi Kecamatan Nambo



Foto: Penarikan KKN Tematik UHO 2022

Publikasi pada media elektronik

Setelah mengikuti kegiatan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online di Kecamatan Nambo Kota Kendari, kami melakukan publikasi pada media pusdayanews.com.

<https://pusdayanews.com/2022/08/23/butuh-support-sumberdaya-pemerintah-terhadap-rekomendasi-kkn-tematik-uho-2022-di-kecamatan-nambo-kota-kendari/>



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo tahun 2022 dan hasil laporan peserta KKN dan informasi dalam diskusi, dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan uraian pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo Taun 2022 dan hasil laporan peserta KKN dan informasi dalam diskusi, dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum ada website kelurahan di Kecamatan Nambo Kota Kendari dan hanya terdapat 1 website Kecamatan Nambo dan belum du Update/Upgrade.
2. Aparat kelurahan belum memahami sistem Administrasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Online di Kecamatan Nambo Kota Kendari.
3. Aparat kelurahan belum memahami tatakelola website

SARAN

1. Pemerintah kelurahan diharapkan dapat memahami dan dapat membuat website kelurahan, tentunya dengan dukungan sumberdaya dari Pemerintah Kota Kendari
2. Pemerintah Kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Nambo diharapkan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (admin/operator) dalam penunjang pengelolaan website.
3. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Nambo diharapkan berkomitmen untuk melaksanakan sistem administrasi pemerintahan kelurahan dapat dikelola secara online melalui pemanfaatan teknolobi informasi berbasis digital (website kelurahan) dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim,Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.18.
- Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.12
- Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2002, h.3
- Thoha,Miftah. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Yunaidi Mayowan, 2016. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa
- UUD 1945 Pasal 28 F
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi.

Permendagri No 34 thn 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

Permendagri No 30 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

KemenPAN-RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

Pepres nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

smartnetizen.id di akses pada tanggal 14 September 2022.

gudangbelajar123.blogspot.com diakses pada tanggal 15 September 2022.

<https://www.niagahoster.co.id>

<https://kendarikota.go.id/>

<http://lapor.kkn-tematik.uho.ac.id/site/login>

<https://pusdayanews.com/2022/08/23/butuh-support-sumberdaya-pemerintah-terhadap-rekomendasi-kkn-tematik-uho-2022-di-kecamatan-nambo-kota-kendari/>